

Tantangan Bakamla sebagai Penjaga Laut Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan di Perairan Indonesia

Dyah Danastri Anindita Nurdewi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Siliwangi, Jombor Lor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55285

Korespondensi penulis: danastri2@gmail.com

Abstract. *This article discusses the challenges faced by Indonesia's Marine Security Agency (Bakamla) in improving security and safety in Indonesian waters, which is the world's largest archipelago. Based on the reality that the importance of Indonesia's vast waters and vulnerability to maritime threats, such as sea crime and smuggling. The purpose of this study is to analyse the challenges of Bakamla and its role as guardian of the sea. The method used is a descriptive qualitative approach, which includes a literature study and in-depth interviews with various relevant parties. The results show that Bakamla faces various constraints, including limited resources, inadequate equipment, and lack of inter-agency coordination. Nonetheless, through a hard power approach and strengthening inter-agency collaboration, Bakamla can strengthen its capacity in maintaining maritime security. This research emphasises the importance of budget support and equipment modernisation to improve Bakamla's effectiveness in protecting Indonesia's maritime interests.*

Keywords: *Bakamla, Challenges, Guard, Indonesia, Sea.*

Abstrak. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan pada realitas bahwa pentingnya perairan Indonesia yang luas dan kerentanan terhadap ancaman maritim, seperti kejahatan laut dan penyelundupan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tantangan Bakamla serta peranannya sebagai penjaga laut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang mencakup studi literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait. Hasil menunjukkan bahwa Bakamla menghadapi berbagai kendala, termasuk sumber daya yang terbatas, peralatan yang tidak memadai, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Meskipun demikian, melalui pendekatan *hard power* dan penguatan kolaborasi antar lembaga, Bakamla dapat memperkuat kapasitasnya dalam menjaga keamanan maritim. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan anggaran dan modernisasi peralatan untuk meningkatkan efektivitas Bakamla dalam melindungi kepentingan maritim Indonesia.

Kata kunci: Bakamla, Indonesia, Laut, Penjaga, Tantangan.

1. LATAR BELAKANG

Lautan memiliki peranan yang krusial terhadap kesejahteraan sebuah negara, seperti Indonesia yang diuntungkan sebab 75% wilayahnya terdiri dari lautan. Sesuai informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Indonesia adalah rumah bagi 17.504 pulau, membentang dari Sabang hingga Merauke (Green Peace 2019). Hamparan maritim Indonesia mencakup sekitar 5,8 juta kilometer persegi, secara signifikan melampaui wilayah terestrial, yang berukuran sekitar 2,012 juta kilometer persegi. Faktor geografis Indonesia sangat menguntungkan bagi munculnya banyak pulau, sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terkemuka secara global (Mahmudah et al. 2023). Sebagai negara kepulauan, perairan di sekitar Indonesia memainkan peran penting sebagai jalur transportasi maritim yang

menghubungkan berbagai pulau. Karakteristik kepulauan yang unik, ditambah dengan posisi strategis Indonesia di pusat lautan dunia, memberikan bukti yang kuat akan relevansi negara ini dalam konteks maritim (P et al. 2023).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah perairannya. Namun, posisi strategis ini juga membuat Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk kejahatan maritim, penyelundupan, dan degradasi lingkungan. Pembentukan sebuah lembaga dengan tanggung jawab khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia sebagai penjaga pantai atau *coast guard* didirikan. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Bakamla bertanggung jawab untuk memantau semua kegiatan di perairan Indonesia dan menegakkan hukum laut. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang Bakamla, termasuk penjelasan mengenai sejarah perkembangannya, penjelasan mengenai visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Bakamla berfungsi tidak hanya sebagai otoritas pengawasan, tetapi juga sebagai entitas koordinasi yang penting dengan berbagai lembaga, termasuk Angkatan Laut, Angkatan Darat, Polisi Air, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi Bakamla sangat signifikan, seperti sumber daya yang terbatas, peralatan canggih yang tidak memadai, dan kerjasama antar lembaga yang kurang optimal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang, “Apa tantangan Bakamla sebagai Penjaga Pantai Indonesia untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di perairan Indonesia?”.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Hard Power*

Secara ringkas, konsep kekuatan atau power dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: *hard power*, *soft power*, dan *smart power*. Kategori pertama yakni *hard power*, mencakup penggunaan taktik yang kuat untuk memajukan kepentingan nasional dan memberikan pengaruh terhadap negara lain. Kategori kedua, *soft power*, menekankan pada inisiatif diplomatik, kolaborasi, dan kemampuan untuk mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan paksaan. Jenis ketiga, *smart power*, adalah kombinasi dari *hard power* dan *soft power* yang digunakan untuk mencapai keseimbangan dalam penggunaan kekuatan militer, keterampilan diplomatik, dan sumber daya. Untuk mencapai efektivitas, negara-negara perlu mengadopsi pendekatan *smart power* yang memanfaatkan kombinasi sumber

daya, pendekatan institusional, kemitraan, aliansi, dan kekuatan militer untuk meraih tujuan mereka dengan cara yang tepat. (Iswardhana and Arisanto 2022).

Kapasitas untuk menjalankan kekuasaan bervariasi di antara negara-negara, tergantung pada pendekatan dan prioritas mereka dalam upaya menjadi negara besar. Manifestasi kekuasaan dapat diamati dalam berbagai bentuk, termasuk kontrol atas wilayah, populasi, sumber daya alam, ekonomi, politik, militer, dan kondisi negara (Adi Wibawa et al. 2024). Elemen-elemen ini digunakan sebagai instrumen persuasi untuk mendorong negara lain agar mematuhi hasil yang diinginkan. Kekuatan atau kapasitas suatu negara merupakan faktor penting dalam kemampuannya untuk terlibat dalam hubungan internasional dan memajukan kepentingan nasionalnya. Namun, kemampuan masing-masing negara berbeda-beda tergantung pada strategi dan tujuan spesifiknya dalam upaya untuk mencapai keberhasilan (Iswardhana, Winanti, and Nurhayati 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif deskriptif, yang menggabungkan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam (Silverman David 2011). Metode ini dipilih untuk menggali informasi dari berbagai sumber terkait tentang Bakamla dan untuk memastikan keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh lembaga ini. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, jurnal, laporan tahunan Bakamla, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait (Smith 2016), termasuk anggota Bakamla, pengamat keamanan laut, dan pakar hukum laut. Pendekatan deskriptif memungkinkan para peneliti untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang fenomena tersebut (Taylor, Bogdan, and DeVault 2015), sementara pendekatan kualitatif menawarkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika operasi Bakamla.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Lembaga Bakamla

a. Sejarah Bakamla

Dengan berlakunya UU No. 32.2014 terkait Keamanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berganti nama menjadi Badan Keselamatan Laut (Bakamla). Undang-undang, yang disahkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, menggambarkan bahwa Bakamla beroperasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Urusan Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan dipercayakan melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut serta wilayah

yurisdiksi Indonesia, yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinental, dan Zona Tambahan (Purnama and Iswardhana 2022). Hamparan geografis landas kontinen, membentang hingga kedalaman 200 meter, di samping batas ZEE yang terletak di 200 mil laut dari dasar laut, bersamaan dengan demarkasi laut teritorial 12 mil laut dari garis dasar. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah tentunya menimbulkan potensi ancaman bagi kedaulatan negara. Sehingga, penjagaan perairan laut Indonesia memerlukan perencanaan yang teliti (Lasabuda 2013).

Pembentukan Bakamla tidak hanya menandakan peningkatan kemampuan pengawasan atas wilayah maritim Indonesia tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan potensi bangsa secara keseluruhan, terutama dalam kaitannya dengan sumber daya maritim dan kapasitasnya untuk melindungi dari berbagai ancaman (Iswardhana 2021). Mengingat keadaan yang terus berkembang, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki dan memodernisasi peraturan yang berkaitan dengan Dewan Koordinasi Keselamatan Kelautan. Inisiatif ini akan mendorong peningkatan kolaborasi di antara beragam lembaga pemerintah yang terlibat dalam upaya keamanan laut. Dalam upaya mengejar tujuan ini, Kelompok Kerja Perencanaan Pengembangan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut dibentuk di bawah naungan Menteri Koordinator Urusan Politik dan Keamanan. Untuk mempertimbangkan mandat Bakamla dalam menyusun kebijakan nasional mengenai keamanan teritorial Indonesia, persiapan yang cermat dilakukan hingga 29 Desember 2005. Jangka waktu ini mencakup serangkaian seminar dan pertemuan koordinasi, yang akhirnya mengarah pada berlakunya Peraturan Presiden No. 81/2005 tentang Dewan Koordinasi Keamanan Laut, yang secara efektif meletakkan dasar bagi Dewan Koordinasi Keamanan Laut.

b. Instansi Terkait

Bakamla berdiri sebagai otoritas definitif untuk memastikan keselamatan dan keamanan di perairan Indonesia dan wilayah laut internasional. Terdapat beberapa instansi yang juga ditugaskan untuk menjaga keamanan laut di Indonesia, termasuk Angkatan Laut Nasional TNI AL, Bea Cukai (BC), Polres Air (Polair), Unit Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), dan Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) (Azis, Setyawanto, and Hardiwinoto 2016). Di antaranya adalah KPLP, yang memiliki otoritas yang mirip dengan Bakamla. Di panggung internasional, KPLP diakui sebagai Penjaga Laut dan Pantai Indonesia (ISCG). Pendiriannya berakar pada implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran, yang

menjelaskan pelayaran sebagai sistem terpadu yang mencakup tenaga maritim, perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, bersama dengan perlindungan lingkungan maritim. KPLP dipercayakan memegang peran penting dalam menegakkan undang-undang keselamatan dan keamanan maritim Indonesia dalam ranah pelayaran internasional (Ayu and Wulida 2023).

Meskipun lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk memastikan keamanan dan keselamatan perairan Indonesia, masing-masing lembaga juga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. TNI Angkatan Laut misalnya, tidak hanya bertugas menjaga keamanan wilayah maritim nasional Indonesia, tetapi juga terlibat dalam kegiatan diplomatik untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri Indonesia (Wibawa, Ridha Iswardhana, and Chotimah 2021). Selain itu, TNI AL juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan maritim negara. Sebaliknya, Polisi Air diberi tugas khusus, termasuk melakukan patroli di perairan, pembinaan masyarakat pesisir dan maritim, dan penyediaan layanan pencarian dan penyelamatan jika terjadi insiden di laut. Hal ini berbeda dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan penangkapan ikan, usaha akuakultur, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, pengawasan dan pemantauan operasional kapal, pengembangan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta perumusan kebijakan yang mengatur tindak pidana kelautan dan perikanan (Purba 2022). Dapat dipahami bahwa PSDKP lebih berfokus pada pengaturan sumber daya alam di laut dan sekitarnya.

Bakamla: Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan di Perairan Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya maritim yang melimpah dan posisi geografis yang strategis. Namun, hal ini juga membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman maritim, termasuk pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) didirikan dengan tujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan keamanan dan keselamatan perairan Indonesia. Analisis ini akan mengkaji cara-cara yang dilakukan Bakamla untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim di perairan Indonesia melalui *hard power*. *Hard power* dapat dipahami sebagai penggunaan taktik koersif, seperti kekuatan militer atau sanksi ekonomi, dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku negara atau aktor lain. Sebaliknya, kekuatan lunak didasarkan pada penggunaan persuasi dan pengaruh. Konsep *hard power* sangat penting untuk memahami cara-cara negara menjaga kepentingan

mereka dan menjamin keamanan nasional, terutama dalam konteks maritim sebab isu mengenai integritas teritorial sering kali menjadi sumber perselisihan.

Pembentukan Bakamla terkait erat dengan aspek militer, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga wilayah Natuna dan mempertahankan kepentingan nasional. Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) menjadi contoh pendekatan strategis negara terhadap keamanan maritim dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada masyarakat sipil untuk melindungi wilayah kedaulatannya melalui penggunaan kebijakan yang bersifat koersif. Kepulauan Natuna, yang merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia, terletak dekat dengan Garis Sembilan Putus-Putus yang menjadi sengketa dengan Tiongkok. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan bagi integritas teritorial Indonesia (Iswardhana, Wibawa, and Hidayat Chusnul 2021). Implementasi pendekatan *hard power* oleh pemerintah melalui Bakamla merupakan respon atas klaim Tiongkok dan pengerahan pasukan dari China Coast Guard (CCG) yang dianggap sebagai bentuk ancaman militer yang membahayakan wilayah Indonesia. Pembentukan Bakamla diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan sinergi dengan operasi militer Indonesia lainnya, sehingga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertahankan Kepulauan Natuna dan menjaga kedaulatannya. Dalam hal ini, Bakamla memiliki peran penting dalam merealisasikan kebijakan keamanan nasional Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan klaim Tiongkok atas Natuna terkait dengan ancaman yang berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, politik, dan militer (Ilyas et al. 2024).

Konsep *hard power* dalam konteks Bakamla mencerminkan pendekatan yang digunakan oleh Indonesia untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah maritimnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bakamla tidak hanya berfungsi sebagai badan pengawas, tetapi juga sebagai badan penegak hukum di perairan Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kepentingan strategis seperti Natuna, yang letaknya berdekatan dengan klaim teritorial Tiongkok. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan *hard power* untuk melindungi kepentingan nasionalnya, terutama dalam konteks konflik maritim yang melibatkan negara lain. Penggunaan kekuatan yang tegas oleh Bakamla dalam menanggapi ancaman menunjukan komitmennya, termasuk melalui tindakan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan pelanggaran peraturan maritim (Abas et al. 2023). Bakamla berperan sebagai badan koordinasi antara berbagai lembaga keamanan, termasuk TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan. Pendekatan ini berfungsi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mengatasi tantangan maritim, sehingga meningkatkan efektivitas pengerahan kekuatan keras dalam perlindungan

kedaulatan nasional (Iswardhana 2020). Meskipun tujuan Bakamla yang jelas dalam penegakan keamanan maritim, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan peralatan modern masih dapat menghambat kemampuannya untuk memanfaatkan kekuatan keras secara optimal.

Pembentukan Bakamla merupakan respons langsung terhadap semakin kompleksnya tantangan keamanan maritim yang dihadapi Indonesia. Badan ini secara resmi ditunjuk sebagai Badan Keamanan Laut Nasional dan didirikan melalui keputusan bersama oleh beberapa kementerian, dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden Indonesia. Hadirnya Bakamla bertujuan untuk memantau dan menegakkan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia yang luas, yang meliputi ZEE, landas kontinen, dan zona-zona lain yang telah ditetapkan. Visi Bakamla adalah untuk membangun sistem keamanan maritim yang terpercaya dan profesional, sehingga dapat meningkatkan posisi dan identitas global Indonesia (Iswardhana 2023). Misi Bakamla mencakup beberapa tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan perlindungan kepentingan maritim Indonesia melalui pelaksanaan penegakan hukum yang efektif serta membina kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Selain itu, Bakamla juga berupaya untuk memperkuat kebijakan nasional yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, serta membangun sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan yang komprehensif sehingga memungkinkan respons proaktif terhadap potensi ancaman (Iswardhana 2024).

Negara memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan pencapaian kepentingan nasional serta untuk menentukan jenis dan metode kekuatan yang paling sesuai untuk digunakan dalam upaya mencapai tujuan tersebut (Adi Wibawa et al. 2024). Sangat penting bagi negara untuk mengevaluasi kemampuan negara lain yang dianggap sebagai ancaman untuk memastikan apakah perlindungan diperlukan atau apakah mereka dapat diabaikan (Putri et al. 2023). Pendekatan tersebut merupakan sintesis dari idealisme dan realisme, yang mencakup pengelolaan sumber daya dan perumusan strategi diplomatik. Pemanfaatan strategis dari *hard power* sangat penting untuk mewujudkan kepentingan nasional, pencapaian legitimasi, dan penggunaan pengaruh terhadap negara lain.

Terlepas dari tujuan yang telah ditetapkan, Bakamla dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait keterbatasan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Kapasitas operasional Bakamla sering kali terkendala oleh kurangnya dana, peralatan modern, dan personel. Kendala-kendala ini dapat menghambat kemampuannya untuk secara efektif memproyeksikan *hard power* dalam penegakan hukum (Yuliana and Iswardhana 2024). Meskipun Bakamla dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya

keamanan, perbedaan mandat dan budaya operasional di antara berbagai lembaga dapat menyebabkan inefisiensi. Kolaborasi yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan *hard power*, dan gangguan yang dapat menghambat waktu respons serta efektivitas dalam menangani ancaman maritim.

Tantangan yang Dihadapi dan Solusi Terhadap Bakamla

a. Tantangan Keberadaan Bakamla

Bakamla dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan yang paling mendesak adalah keterbatasan sumber daya, antara lain:

Pertama, Bakamla beroperasi dalam batasan anggaran yang berdampak merugikan secara signifikan pada kapasitas operasionalnya. Pendanaan yang tidak memadai membatasi kemampuan Bakamla untuk mendapatkan peralatan dan teknologi modern yang diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum maritim yang efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, Bakamla tidak dapat mempertahankan kehadiran kuat di perairan Indonesia yang krusial untuk mencegah kegiatan ilegal dan memastikan keamanan nasional.

Kedua, mengenai keterbatasan finansial, Bakamla menghadapi kendala akibat kurangnya peralatan modern. Efektivitas operasional Bakamla terhambat oleh keterbatasan kapal-kapal kontemporer, sistem pengawasan, dan teknologi komunikasi. Kekurangan ini menghambat kemampuan Bakamla untuk melaksanakan patroli secara tepat waktu dan efektif, memantau aktivitas maritim, dan merespons ancaman dengan cepat. Mengingat sifat ancaman maritim yang terus berkembang, semakin mendesak untuk memperoleh kemampuan teknologi canggih.

Ketiga, peran Bakamla sebagai badan koordinasi di antara berbagai lembaga keamanan sangat penting untuk tata kelola domain maritim yang efektif. Namun, perbedaan dalam mandat dan budaya operasional antar lembaga, termasuk Angkatan Laut Indonesia dan Polisi Air, sering kali menyebabkan inefisiensi. Kurangnya strategi nasional yang terpadu untuk keamanan maritim dapat mengakibatkan pelaksanaan upaya yang tidak konsisten, hingga akhirnya mengurangi efektivitas operasi Bakamla secara keseluruhan. Oleh karena itu, kolaborasi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan *hard power* dan meningkatkan kesiapan operasional.

Keempat, kerangka hukum yang mengatur keamanan maritim di Indonesia merupakan tantangan yang signifikan bagi Bakamla. Bakamla beroperasi dalam jaringan hukum nasional dan internasional yang kompleks, yang dapat menjadi kesulitan tersendiri untuk dipahami. Penegakan hukum maritim sering kali memerlukan

pemahaman mendalam mengenai berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu-isu seperti perairan teritorial, ZEE, dan hukum pelayaran internasional. Ketidakjelasan atau inkonsistensi dalam regulasi ini dapat menghambat kemampuan Bakamla untuk bertindak dengan cepat dan tegas dalam menanggapi ancaman maritim.

Kelima, ancaman maritim eksternal didukung dengan lokasi strategis Indonesia di jantung Asia Tenggara, membuat Indonesia rentan terhadap ancaman dari kekuatan-kekuatan regional khususnya pada wilayah perairannya yang luas. Peningkatan ketegasan negara-negara seperti Tiongkok di wilayah maritim yang disengketakan secara langsung menantang kedaulatan Indonesia. Kehadiran angkatan laut asing di dekat wilayah perairan Indonesia berdampak pada peningkatan ketegangan dan memperumit lanskap operasional Bakamla. Bakamla ditugaskan untuk menavigasi dinamika geopolitik ini sembari memastikan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

b. Solusi Terhadap Tantangan Bakamla

Guna menyelesaikan kelima permasalahan di atas diperlukan berbagai upaya, antara lain:

Pertama, memprioritaskan pendanaan untuk Bakamla sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan yang disebabkan oleh sumber daya yang terbatas. Alokasi dukungan keuangan yang lebih besar kepada Bakamla dapat memfasilitasi pengadaan peralatan modern dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Hadirnya sumber daya yang memadai bagi Bakamla akan berguna untuk menerapkan langkah-langkah keamanan maritim yang efektif sehingga dapat menjamin keselamatan perairan Indonesia dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Kedua, sangat penting bagi Bakamla untuk menginvestasikan sumber daya pada peralatan dan teknologi modern guna meningkatkan efektivitas operasionalnya. Hal ini mencakup akuisisi sistem pengawasan canggih, kapal patroli, dan teknologi komunikasi terkini. Modernisasi armada serta peningkatan kemampuan Bakamla akan meningkatkan kapasitasnya untuk memantau aktivitas maritim, melakukan patroli yang efektif, dan merespons ancaman dengan cepat.

Ketiga, peningkatan kolaborasi antar lembaga merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan efektivitas operasional Bakamla. Perumusan strategi nasional yang terintegrasi untuk keamanan maritim dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih baik di antara berbagai lembaga. Pelaksanaan latihan bersama dan program pelatihan

rutin dapat memfasilitasi peningkatan interoperabilitas dan memastikan bahwa semua lembaga selaras dalam upaya menjaga perairan Indonesia. Untuk menghadapi ancaman maritim eksternal, Bakamla perlu mengembangkan strategi yang dapat memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Hal ini mungkin memerlukan penguatan kemitraan dengan sekutu regional serta partisipasi dalam inisiatif keamanan maritim bersama. Dengan membangun hubungan kerja sama, Indonesia dapat menciptakan kerangka kerja keamanan kolektif yang mampu mengatasi tantangan bersama dalam domain maritim.

Keempat, kerangka hukum yang mengatur keamanan maritim perlu disederhanakan dan diperjelas untuk memberdayakan Bakamla dalam menghadapi ancaman yang muncul dengan lebih tegas. Pembentukan seperangkat peraturan terpadu yang jelas menggambarkan peran dan tanggung jawab berbagai lembaga yang terlibat akan meningkatkan kemampuan Bakamla dalam menegakkan hukum maritim secara efektif. Keterlibatan ahli hukum dapat membantu mengidentifikasi dan penyelesaian ambiguitas atau ketidakkonsistenan yang mungkin muncul dalam kerangka kerja legislatif yang ada.

Kelima, Bakamla melaksanakan inisiatif penjangkauan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong keterlibatan masyarakat. Inisiatif ini harus dirancang untuk mengedukasi para pemangku kepentingan mengenai pentingnya keamanan maritim. Selain itu, program kolaboratif dengan sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat mendorong terciptanya budaya tanggung jawab bersama dalam menjaga perairan Indonesia. Masyarakat juga direkomendasikan untuk aktif terlibat dalam upaya keamanan maritim, karena hal ini akan meningkatkan kerja sama dan dukungan terhadap misi Bakamla.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bakamla menghadapi berbagai tantangan dalam upayanya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Keterbatasan sumber daya, peralatan yang sudah usang, masalah kolaborasi antarlembaga, kerangka hukum yang kompleks, ancaman eksternal, degradasi lingkungan, serta keterlibatan publik yang masih belum terlihat, semua hal tersebut berkontribusi terhadap kesulitan yang dihadapi Bakamla. Namun, dengan mengadopsi pendekatan strategis yang bersumber pada konsep *hard power*, Bakamla dapat bekerja untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Melalui peningkatan alokasi sumber daya, modernisasi peralatan, kolaborasi yang lebih baik, pembentukan kerangka hukum yang

efisien, dan keterlibatan masyarakat, Bakamla dapat memperkuat kapasitasnya untuk melindungi kepentingan maritim Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas ini, efektivitas Bakamla akan sangat penting untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia yang luas.

Bakamla dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan melalui beberapa strategi utama yang merujuk pada *hard power*. Bakamla menerapkan berbagai langkah penegakan hukum yang kuat, termasuk patroli dan pengawasan rutin, untuk mencegah aktivitas ilegal di dalam wilayah perairan. Operasi anti-pembajakan yang berhasil dijalankan oleh Bakamla menunjukkan efektivitasnya dalam memproyeksikan kekuatan. Operasi seperti itu sangat penting untuk menjaga ketertiban di laut dan menumbuhkan rasa aman di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perdagangan maritim. Selain itu, Bakamla juga dapat meningkatkan kebijakan nasional yang terkait dengan keamanan laut, mengembangkan sistem peringatan dini yang otonom, dan membangun infrastruktur modern yang mampu mendukung operasionalnya. Bakamla berupaya untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk keselamatan maritim yang responsif terhadap ancaman yang muncul, sambil tetap memastikan penegakan hukum yang kuat dengan memprioritaskan area-area tersebut.

Bakamla memiliki peran penting untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Mengingat luasnya wilayah maritim Indonesia dan kerentanan yang melekat di dalamnya, hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Bakamla didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman pembajakan, penyelundupan, dan degradasi lingkungan. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Bakamla memiliki mandat utama untuk menegakkan hukum maritim dan mengoordinasikan upaya keamanan di berbagai badan pemerintah. Perkembangan historis Bakamla mencerminkan pendekatan strategis Indonesia terhadap keamanan maritim, terutama dalam menjaga kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan seperti Kepulauan Natuna. Bakamla mengintegrasikan sumber daya militer dan sipil untuk menciptakan sistem keamanan maritim yang tepercaya dan profesional serta mampu melindungi kepentingan nasional dan memperkuat identitas Indonesia sebagai poros maritim yang penting di panggung global.

DAFTAR REFERENSI

- Abas, M., Z. Zuhrah, Y. Meliana, K. Khairina, A. Anisa, M. R. Iswardhana, S. Suryaningrat, A. Aermadepa, Y. Mulyeni, A. I. Hadi, and others. 2023. *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Adi Wibawa, Muhammad Ridha Iswardhana, Maria Stephanie Olivia Jawa, Faisal Hasibuan, Annisa Rahmatin, Jescinka Priendisaputri, and Dian Inda Yani. 2024. “Kegiatan Pengabdian Masyarakat Melalui Kampanye Lindungi Bumi: Berhenti Membuang Sampah Sembarangan Dan Mulailah Mendaur Ulang.” *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4(3):122–31. doi: 10.56910/safari.v4i3.1588.
- Ayu, Riana Kesuma, and Ziyada Wulan Wulida. 2023. “Kewenangan Bakamla Dalam Perlindungan Keamanan Lingkungan Maritim Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.” *Jurnal WASAKA HUKUM* 11(2337):162–76.
- Azis, Nazili Abdul, L. Tri Setyawanto, and Soekotjo Hardiwinoto. 2016. “KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA.” *Diponegoro Law Journal* 5(4):1–13. doi: 10.14710/dlj.2016.15743.
- Green Peace. 2019. *Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Greenpeace Southeast Asia.
- Ilyas, Arifai, Iswardhana Muhammad Ridha, Lorina Siregar Sudjiman, and Sudjiman Eduard Paul. 2024. *Bisnis Internasional*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Adi Wibawa, and Hidayat Chusnul. 2021. “Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(6):1411–13.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, and Pugh Toko Arisanto. 2022. “IMPLEMENTASI SMART POWER DAN LINKAGE ISSUES INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN KEDAULATAN MARITIM DI KEPULAUAN NATUNA.” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14(02):210–45. doi: 10.52166/madani.v14i02.3240.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Poppy Sulistyaning Winanti, and Ririn Tri Nurhayati. 2023. “Rethinking Domestic Politics of Indonesian SSTC in Africa and Paradox of MRLs Education Training.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9(4):268. doi: 10.29210/020233381.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2020. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2021. “Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat Sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard” *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 4(1):1–15. doi: 10.36341/jdp.v4i1.1569.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2023. “Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 13(2):125. doi: 10.15578/jksekp.v13i2.12542.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2024. “The Indonesian Government Responds to Protecting the Natuna Area through the Utilization of National Security.” *The International Journal of Politics and Sociology Research (IJOPSOR)* 12(2):147–56. doi: <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v12i2.262>.

- Lasabuda, Ridwan. 2013. “PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA.” *JURNAL ILMIAH PLATAX* 1(2):92. doi: 10.35800/jip.1.2.2013.1251.
- Mahmudah, Husnatul, Didik Suhariyanto, Rahma Melisha Fajrina, Elwidarifa Marwenny, Liza Husnita, Ranti Nazmi, Muhammad Ridha Iswardhana, Sry Wahyuni, Helfira Citra, and Sa’dianoor Sa’dianoor. 2023. “Pengantar Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas.” in *PENGANTAR KEWARGANEGARAAN: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- P, M. A. C., D. A. Suryaningrum, N. M. T. Ayuk, D. Retnowati, F. Damayanti, T. O. Langoday, I. G. A. M. A. M. A. Pratiwi, M. R. Iswardhana, A. Apriani, and others. 2023. *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori Dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 \& Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purba, Cindy Nadia. 2022. *Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam*. Batam: Skripsi Universitas Putera Batam.
- Purnama, Ari Bayu, and Muhammad Ridha Iswardhana. 2022. “KALIMANTAN BORDER ISSUES AND INDONESIA’S BORDER DIPLOMACY TOWARDS MALAYSIA.” *Natapraja* 10(2):105–24. doi: 10.21831/natapraja.v10i2.42347
- Putri, Mas, Randi Saputra, Muhammad Ridha Iswardhana, Emillia, Ranny Rastati, Agus Sugiharto, Agus Rendra, Muhammad Rachimoellah, Tsulis Amiruddin Zahri, Nofita Octaviany, and Putri Handayani Lubis. 2023. “Kewarganegaraan: Teoretis Dan Praksis.” (April 2024):1–233.
- Silverman David. 2011. “*Qualitative Research*.” SAGE Publications Ltd 450.
- Smith, J. A. 2016. *Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods*. SAGE Publications.
- Taylor, S. J., R. Bogdan, and M. L. DeVault. 2015. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. Wiley.
- Wibawa, Adi, Muhammad Ridha Iswardhana, and Hidayat Chusnul Chotimah. 2021. “Pola Interaksi Antar-Lembaga Dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia: Bakamla RI.” *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 3(3):12–26. doi: 10.15575/jbpd.v3i3.14582.
- Yuliana, Lidia Eka, and Muhammad Ridha Iswardhana. 2024. “The Geoeconomics Analysis of the Digital Currency Law in El Salvador.” *LEGAL BRIEF* 13(3):706–19.